

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK  
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BONE**

**SKRIPSI**

**A.INDAH NURFADILLAH  
10573 04264 13**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

**ANALISIS ATAS LAPORAN REALISASI AGGARAN  
UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BONE**

**SKRIPSI**

**A.INDAH NURFADILLAH**

**10573 04264 13**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2018**

## **PERSEMBAHAN**

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Basri dan ibundaA.Asmi, yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, karena tiada do'a yang paling khusyu' selain do'a dari kedua orangtua serta saudara dan sepupu saya yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak dan ibu dosen, terkhusus kedua pembimbing yang selama ini tulus dan ikhlas meluangkan waktunya menuntun dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Para sahabat –sahabat yang selalu memberi bantuan dan memberi semangat beserta dukungan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

## **MOTTO**

Sabar dalam mengatasi kesulitan  
dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya  
adalah sesuatu yang utama

**&**

Aku percaya bahwa apapun yang aku terima  
saat ini adalah yang terbaik dari Tuhan yang  
selalu memberikan yang terbaik untukku dan  
pada waktu yang telah Ia tetapkan



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone  
Nama Mahasiswa : A.IndahNurfadillah  
No. Stambuk/ NIM : 105730426413  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah Diseminarkan Dan Diujikan Pada Sabtu,13 oktober 2018.


Makassar, 16 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


  
Dr.Hj.Ruliaty MM  
NBM: 822478

Pembimbing II

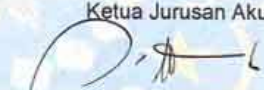
  
Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA.CSP  
NBM: 1073428

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

  
Jemâil Rasulong, SE,MM  
NBM: 903078

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA.CSP  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl.Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama **A.INDAH NURFADILLAH**, NIM : **105730426413**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :191/2018 M, tanggal 04 Safar 1440 H/13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

04 Safar 1440 H  
Makassar,  
13 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum : | Dr.H.Abdul Rahman Rahim.SE.,Mm (.....) |  |
|                    | (Rektor Unismuh Makassar)              |  |
| 2. Ketua :         | Ismail Rasulong,SE.,MM (.....)         |  |
|                    | (Dekan Fak.Ekoomi Dan Bisnis)          |  |
| 3. Sekretaris :    | Dr.Agus Salim HR,SE.,MM (.....)        |  |
|                    | (WD.1 Fak.Ekoomi Dan Bisnis)           |  |
| 4. Penguji :       | 1. Amir,SE.,M.Si,Ak.CA (.....)         |  |
|                    | 2. Faidhul Adziem,SE,M.Si (.....)      |  |
|                    | 3. Agusdiwana Suarni,SE.,M,ACC (.....) |  |
|                    | 4. Drs.H.Hamzah Limpo,M.Si (.....)     |  |

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Ismail Rasulong,SE.,MM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel.(0411) 866972 Makassar



### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.INDAH NURFADILLAH  
Stambuk :105730426413  
Jurusan :AKUNTANSI  
Dengan judul : "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone."

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar,16 Oktober 2018

Yano Membuat Pernyataan

  
**A.INDAHNURFADILLAH**

Diketahui Oleh

  
Dekan Fakultas Ekonomi  
**Ismail Rasulong, SE.,MM**  
NBM: 903078

  
Ketua Jurusan Akuntansi  
**Ismail Badollahi,SE.M.Si.Ak.CA**  
NBM: 1073428

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segalarahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone**”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Basri dan Ibu A.Asmi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do’a tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudariku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar saya atas segala pengorbanan, dukungan dan do’a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :



1. Bapak Dr. H. AbdRahmanRahim , SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi,SE,. M.Si. Ak.CA, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.Hj.RuliatyMM.selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Ismail Badollahi,SE,. M.Si. Ak.CA, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan–rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan akuntansi angkatan 2013 khususnya AK6-13 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk sahabat penulis, Zahrah Delima Ahmad, Indrasari,Nurikhsana,ummikalsum dan jumriah yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fisabilil Haq FastabiqulKhairat, Wassalamualaikum Wr. Wb*

Makassar, 16 Oktober 2018

Penulis

## **ABSTRAK**

A. Indah Nurfadillah Nomor Induk Mahasiswa 105730426413, Program Studi Ilmu Akuntansi, Fakultas Ilmu ekonomi, Universitas Muhammadiyah Makassar menyusun skripsi dengan judul Analisis atas laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bone, dibawah bimbingan Ibu Dr.Hj.Ruliaty MM, sebagai Pembimbing I dan Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si. AK sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis atas laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bone dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis data dengan teknik kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19 % pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2015. Kedua, Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio

efisien 2,71%, dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%.Ketiga,Sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal.Namun pelaksanaan pembangunan masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terlihat dari rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.Keempat,Pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif.Dan Kelima,Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode penelitian (tahun 2014 sampai tahun 2016) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

---

**Kata kunci** : PAD,Realisasi Anggaran pemda kabupaten Bone.

## ABSTRACT

A. Indah Nurfadillah Number Mains Student 105730426413, Program Study Science Accountancy, Faculty Economics, University of Muhammadiyah Makassar compile skripsi with title Analyse of report realize budget to measure performance local government of Sub-Province of Bone, below/under tuition Ms. Dr. Hj. Ruliaty MM, as Counsellor of I and Father of Ismail Badollahi, Se, M. Si. Ak as Counsellor of II.

This Research aim to to know Analysis of report realize budget to measure performance local government of Sub-Province of Bone by and intensification of ekstensifikasi, there [is] factors influencing [it]. Research method the used [is] qualitative, data collecting technique [pass/through] observation, interview, and also archives and document by using technique analyse data with technique qualitative.

Result of research of menunjukkan that: Pertama, Kemandirian Local Government Of Sub-Province of Bone in fulfilling requirement of fund for the management of governance duties, development, and social services to society still very low and even experience of to fluctuate from year to year, that is from 4,19 % in the year 2014 becoming 4,33% in the year 2015 and 3,01% in the year 2016. Where happened the make-up of area independence later on experience of degradation in the year 2015. Kedua, Kinerja Local Government Of Sub-Province of Bone in merealisasikan earnings of its area genuiness pertained is not effective and pertained is efficient, namely in the year 2014 owning ratio of efektifitas 62,19% and efficiency ratio 2,13% later; then in the year 2015 owning ratio of efektifitas equal to 59,53% and efficient ratio 2,71%, and in the year 2016 owning ratio of efektifitas 32,96% efficient ratio equal to 2,16%. Ketiga, Sebagian big which owned

[by] Local Government Of Sub-Province of Bone still given high priority to answer the demand [of] requirement of expense operate for than expense of modal. Namun execution of development still less paid attention by Local Government Of Sub-Province of Bone seen from capital expense ratio from year to year APBD menurun. Keempat, Pertumbuhan Local Government Of Sub-Province of Bone budget year 2014-2016 indicating that growth of earnings of area genuiness and growth of expense.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHASAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKBAHASA INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/ BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Teoris .....	7
1. Laporan keuangan.....	7
2. Laporan Reakisasi Anggaran .....	10
3. Definisi kinerja .....	12
4. Definisi Pengukuran Kinerja .....	13
5. Tujuan penilaian kinerja.....	14
6. Aspek Pegukuran Kinerja .....	15
7. Kinerja keuangan pemerintah daerah.....	16
8. Rasio Keuangan.....	19
B. Tinjauan Empiris .....	25
1. Peneliti terdahulu .....	25
C. Kerangka Fikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. LokasiPeneltian.....	34

B. Populasi dan sampel Penelitian .....	34
C. Metode pengumpulan data .....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Variabel Penelitian .....	35
F. Metode Analisis.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Kabupate Bone .....	39
1. Sejarah Singkat kabupaten bone.....	39
2. Struktur organisasi dan <i>Job Description DPPKAD</i> .....	49
3. Visi dan Misi .....	54
B. Hasil Penelitian .....	56
1. Rasio Kemandiria Daerah.....	64
2. Rasio Efektivitas dan Efesiensi.....	65
3. Rasio Aktivitas (keserasian) .....	67
4. Rasio Pertumbuhan.....	71
5. Evaluasi Kinerja keuanga kabupaten bone.....	74
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1	laporan realisasi anggaran tahun 2014 .....	58
4.2	laporan realisasi anggaran tahun 2015 .....	60
4.3	Laporan realisasi anggaran tahun 2016.....	62
4.4	target dan realisasi tahun penerimaan PAD tahun 2014-2015	66
4.5	perhitungan rasio aktivitas .....	69
4.6	perhitungan rasio pertumbuhan .....	71
4.7	Rasio keuangan daerah kab.Bone .....	74
4.8	Rasio Efektifis dan Efesiensi.....	75
4.9	Rasio Keseimbangan.....	76
4.10	Rasio Pertumbuhan .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Fikir .....	33
4.1	Peta.....	45
4.2	Struktur Organisasi.....	48
4.3	Rasio Aktivitas Dan Efisiensi.....	65
4.4	Rasio Belanja .....	68
4.5	Rasio Kemandirian Daerah .....	73
4.6	Rasio Efisiensi.....	75
4.7	Rasio Belanja Modal .....	76
4.8	Rasio Pertumbuhan.....	78

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan salah satu agenda dalam memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, harus memuat komponen-komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi. Salah satu komponen laporan keuangan yang harus dipenuhi tersebut adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh suatu entitas akan menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar yang mengatur tentang bagaimana penyajian laporan realisasi anggaran yang semestinya.

Tujuan dari penetapan standar laporan realisasi anggaran adalah penetapan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk sebagai perwujudan pemenuhan tujuan akuntabilitas publik. Melalui penyusunan laporan realisasi anggaran dapat dihasilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dari informasi tersebut dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Perbandingan tersebut ditujukan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian target-target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran yang terjadi. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat

dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, telah dilaksanakan Sesuai dengan anggaran (APBN/APBD), dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Informasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini sangat berguna untuk mengkaji ulang keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan kepatuhan entitas pelaporan terhadap ketentuan anggaran. Hasil akhir laporan realisasi anggaran ini kemudian akan dipindahkan neraca kelompok ekuitas dana lancar. Setiap laporan realisasi anggaran harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). LRA dan SAP dinyatakan dalam PSAP No.2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP ini berisikan prinsip-prinsip mengenai LRA. Tujuan standar LRA menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lahirnya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan.

Dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Adanya Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otoda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap Pemdanya. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemda melalui program otoda. Tujuan program otoda adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Salah satu aspek dari Pemda yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan

efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengangkat judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Sejauh mana laporan realisasi anggaran mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten bone”?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: "Untuk mengetahui sejauh mana laporan realisasi anggaran mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten bone"

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Blora ditinjau dari teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk Menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten Bone.

#### 2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

b) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh Penerapan teori Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Keserasian untuk menganalisis Kinerja Keuangan DPPKAD Kabupaten bone.

c) Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Laporan Keuangan**

##### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011 : 1), "laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas". Sedangkan menurut Harahap (2010 : 105), "laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu". Pengertian laporan keuangan menurut Agnes Sawir (2005 : 5), "laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhir pun disajikan dalam nilai uang".

Sedangkan menurut Munawir (2008 : 5), pengertian laporan keuangan adalah "dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi".

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dilaksanakan secara konsisten dan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

##### **2. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011 : 1.5-1.6) adalah : "memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja

keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

Kemudian Dwi Prastowo (2011 : 5-6), menambahkan bahwa :

“Tujuan laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di mana informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas serta waktu kepastian dari hasil tersebut”.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi : aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

### **3. Komponen-komponen Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011 : 1.4-1.5), komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari :

- 1.Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

## 2.Laporan laba rugi komprehensif selama periode

Total laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.

## 3.Laporan perubahan ekuitas selama periode

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :

- 1.Total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan *non*-pengendali.
  - 2.Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25.
  - 3.Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari :
    - (1) Laba rugi.
    - (2) Masing-masing pos pendapatan komprehensif lain.
    - (3) Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.
- ## 4.Laporan arus kas selama periode

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut.

#### 5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

## **B. Laporan Realisasi Anggaran**

### **1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.

### **2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran**

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran**

- a) Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b) Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.
- c) Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

### **4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- c) Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

### C. Definisi Kinerja

Menurut Mahsun, Sulistyowati dan Purwanu (2007:157):“ Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Menurut Bastian (2005: 274):

“ memaparkan pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Menurut Bastian (2006:274):“ Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu

untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan.

#### **D. Definisi Pengukuran Kinerja**

Menurut Robertson (dalam Mahsun, Sulistyowati dan Purwanu 2007:157), pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termaksud informasi atas: efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Lohman (dalam Mahsun, Sulistyowati dan Purwanu 2007:157), pengukuran kinerja adalah suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategi organisasi.

Pendapat lain menurut James B. Whittaker (dalam Bastian 2006:330), pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut Larry D Stout dalam *Performance Measurement Guide* (Bastian 2006:329), pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan

kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan datang. Berapa besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

#### **E. Tujuan Penilaian Kinerja**

Prestasi pelaksanaan program dapat diukur untuk mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang.

Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk (Bastian 2006:330):

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
2. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaan.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaanyang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.



8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Pengungkapkan permasalahan yang terjadi.

#### **F. Aspek Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini ( Bastian 2006:331):

1. Aspek Finansial.

Aspek finansial meliputi anggaran atau cash flow. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

2. Kepuasan Pelanggan.

Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

3. Operasi dan Pasar Internal.

Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

4. Kepuasan Pegawai.

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.

5. Kepuasan Komunitas dan *Stakeholders*.

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholders*.

## 6. Waktu

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Mekanisme pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### a. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja.

Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin membuat komitmen pengukuran kinerja, dan menjalankannya dengan tidak mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut.

### b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif. Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja.

### c. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi

Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan bentuk dan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.

## G. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### a) Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi,1986: 199).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* organisasi sektor publik, oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa

Pemerintah Daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi Pemerintah Daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (Ibnu Syamsi, 1986: 99).

1) Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

2) Kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.

3) Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta kegiatan pembangunan.

4)Kemampuan Keuangan Daerah.Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaanpengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## H. Rasio Keuangan

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersil), analisis rasio keuangan umumnya terdiri dari dari :

1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera.
2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur.
3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan.
4. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, yaitu:

1. Para kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

2. Pemegang saham ataupun pemilik perusahaan, yaitu untuk menganalisis sampai sejauh mana perusahaan mampu membayar deviden ataupun memperoleh laba.
3. Pengelola, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan dalam mengambil keputusan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel. Analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi, serta *debt service coverage ratio*. (Halim 2007: 231).

## 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim 2007: 232).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2007) :

- a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Total pendapatan
- b. Pendapatan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

- d. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah
- e. Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio Pendapatan Transfer:

- a. Rasio Pendapatan transfer terhadap Total Pendapatan
- b. Rasio Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Total Pendapatan
- c. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap total Pendapatan
- d. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap belanja Pegawai
- e. Rasio Lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan
- f. Rasio Belanja Transfer/Bag! hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota

## 2. Rasio Efektifitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

### a. Rasio Efektifitas

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah (Halim 2007:234).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio



efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah.

#### **b. Rasio Efisiensi**

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim 2007:234).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

### **3. Rasio Aktifitas (Rasio Keserasian)**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana

ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim 2007:241).

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}$$

Keterangan:

$x_n$  = tahun yang dihitung.

$x_{n-1}$  = tahun sebelumnya.

## B. Tujuan Empiris

### 1. Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	Julitawati	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.	analisis regresi linear berganda	Penelitian ini mengambil populasi pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 Kabupaten/kota, dengan periode waktu dari tahun 2009 hingga tahun 2011. Kriteria yang dijadikan pemilihan populasi adalah kabupaten/kota yang telah memiliki laporan APBD.
2	Cherrya Dhia Wenny	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota	metode analisis statistik	Hasilnya menyatakan bahwa secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang secara dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan

		Di Propinsi Sumatera Selatan		kota di Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan.
3	Ariel Sharon Sumenge	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan	analisis deskriptif	Secara keseluruhan dari tahun 2008 sampai tahun 2012, tingkat efektifitas anggaran belanja BAPPEDA Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tren yang berubah-ubah, kadang mengalami peningkatan kadang penurunan. Tahun 2008 dan 2009 tingkat efektifitas masih dalam kategori cukup efektif dan hanya pada tahun 2011 menunjukkan kategori yang

				<p>kurang efektif, sedangkan tahun 2010 dan 2012 sudah menunjukkan kategori efektif dengan kisaran presentase antara 90% - 100%.</p>
4	<p>Marchelino Daling</p>	<p>Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatandan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.</p>	<p>Metode analisis deskriptif</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan Kabupaten yang baru berdiri setelah dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan. Kabupaten ini berumur 5 tahun sejak dibentuk pada tanggal 23 mei 2007. Seiring berjalannya waktu sejak diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri banyak hal yang harus dilakukan dalam hal pengelolaan keuangan yang baik sebagai daerah yang baru. Dalam penelitian yang</p>

				dilakukan, Kabupaten Minahasa Tenggara sedang berusaha dalam proses perbaikan pengelolaan keuangan yang baik sehingga nantinya bisa menjadi Kabupaten yang mandiri serta berhasil.
5	<b>Ramlah</b> <b>Basri</b>	Analisis Penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi utara.	Metode analisis deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyusunan anggaran di BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dimulai dari pengumpulan data dari bidang mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan ditahun 2012. Program/kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan gambaran dan arahan

				kebijakan serta strategi pembangunan pada tahun 2010 – 2015 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
6.	Haryo Kuncoro	Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia.	Metode analisis deskriptif	Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pusat akan semakin membesar. Implikasinya, apabila transfer dari pusat kurang bisa diprediksi jumlah dan saat pencairannya, pemerintah daerah akan menggunakan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan
7.	DITA		metode	

	ARFIANTI	<p>Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>analisis kuantitatif</p>	<p>operasi fiskalnya. Isyarat ini perlu diwaspadai agar pinjaman tidak menjadi beban anggaran dalam bentuk pembayaran cicilan dan bunga pinjaman yang akan mengurangi kemampuan keuangan daerah, melainkan dapat menjadi faktor pendorong bagi pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur</p>
--	----------	--	-----------------------------	--



				yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.
--	--	--	--	--

Maharani (2006) melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu. Jenis penelitian berupa studi kasus dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dan catatan Pemda Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tingkat kemandirian Pemda Kota Batu rasio kemandirian mengalami penurunan yang berarti Pemda Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan finansial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap total APBD yang masih relatif kecil dan sumber pembiayaan utama masih bersumber dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat.

Yuli Orniati (Universitas Gajayana Malang: 2013) dengan judul "Laporan Keuangan sebagai alat untuk Menilai Kinerja Keuangan". Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa data keuangan perusahaan yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya dilakukan analisis rasio keuangan, yaitu membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan antara satu periode dengan periode lainnya.

Sakti (2010) meneliti tentang analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi empiris di Kabupaten Sukoharjo). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio kemandirian keuangan daerah, indeks kemampuan rutin, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo di sektor keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan PAD, baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.

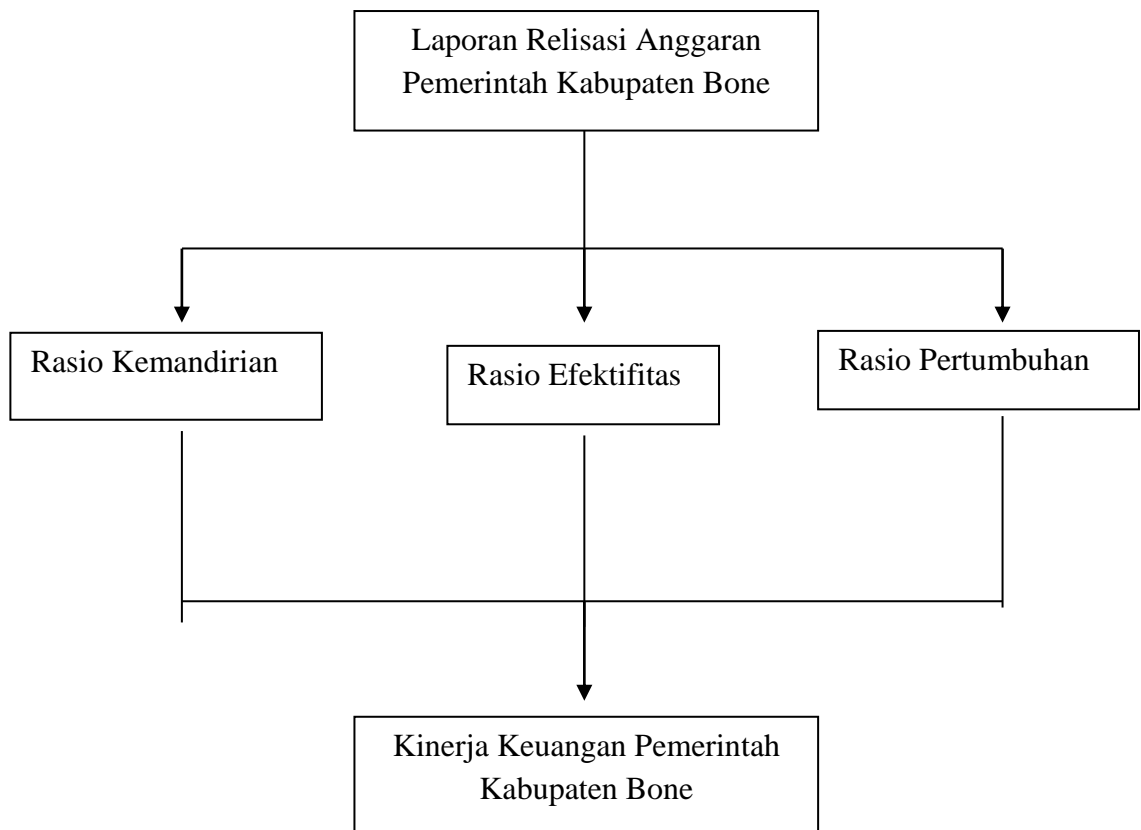
#### **I. Kerangka Pikir**

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Rasio efektifitas
3. Rasio pertumbuhan

Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir secara sistematis seperti berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka fikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Jalan Salotungo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Bone.

#### **B. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bone selama 3(tiga) tahun, dari tahun 2014 sampai 2016.

#### **C. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Tinjauan Pustaka (*Library Research*)Tinjauan pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel-artikel terkait, serta mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemda Kabupaten Bone dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak yang

berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemda Kabupaten Bone tahun anggaran 2013-2016 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari instansi Pemda Kabupaten Bone maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada instansi Pemda Kabupaten Bone.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

#### **E. Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen atau variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y.

- a) Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga memengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. *Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.*

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pusat dan pinjaman}}$$

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. *Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}}$$

b) Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi PAD untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. *Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.*

## **F. Metode Analisis**

### **Analisis deskripsi kuantitatif**

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2013-2016. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemda Kabupaten Bone dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- a.Rasio kemandirian
- b.Rasio efektivitas pendapatan asli daerah
- c.Rasio pertumbuhan



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Bone**

##### **1. Sejarah singkat kabupaten bone**

Mitos ( cerita rakyat ) tentang peristiwa yang mengandung nilai-nilai sejarah di masa lalu, memang sulit di buktikan secara logika, tetapi justru karena seiring dengan perjalanan sejarah dari masa ke masa, maka lebih sulit lagi untuk di tolak atau di tiadakan keberadaannya. sebab itulah akar daripada sejarah itu sendiri.

Kedatangan manurunge ri matajang sekitar tahun 1326 merupakan cikal bakal terbentuknya pemerintahan kerajaan bone dan baginda itulah baginda itulah sebagai raja bone pertama. manurunge ri matajang kawin dengan manurunge ri toro, dan keturunan beliaulah yang menggantikan kedudukan baginda secara hierarki turun temurun sampai tahun 1951 (raja bone terakhir) yang 631 lamanya. menurut cerita rakyat, sebelum kedatangan manurunge ri matajang di negeri ini sudah ada tujuh wanua (negeri kecil) yang di pimpin oleh orang yang dituakan di masing-masing negeri, mengatur kehidupannya sendiri-sendiri. masa itu di sebut masa kegelapan (sianre bale tauwwe) artinya siapa yang kuat, maka dialah yang berhak bertahan untuk hidup dan berkuasa. Asal mula terbentuknya pemerintahan kerajaan bone di bawah dinasti manurungge ri matajang membawa cakrawala kehidupan masyarakat yang baru di tujuh negeri, yaitu membebaskan rakyat di masa kegelapan, menuju pembentukan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Baginda dinobatkan sebagai raja bone pertama tidak dengan paksaan, tetapi masyarakat itu sendiri sepakat datang berbondong-bondong

memohon kesediaan beliau menjadi raja dan panutan mereka. menurut beberapa catatan peristiwa bersejarah tentang kerajaan bone, selama 631 tahun ada 33 generasi yang mengendalikan pemerintahan di bawah dinasti manurungge ri matajang dengan sistem dinasti munarki konstitusi.

Sebagai konstitusi proklamasi 17 agustus 1945 sistem pemerintahan munarki konstitusi di hapuskan menuju tatana kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sistem demokrasi berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945 yang berakar dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa indonesia itu sendiri, seperti yang terdapat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah, dimana pemerintahan soekarno presiden RI yang pertama kita telah mencoba sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Namun karena tidak dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia, maka di masa pemerintahan soeharto presiden RI yang ke dua. Coba lagi dengan demokrasi pancasila dan undang-undang dasar 1945, inipun ternyata belum sesuai, kemudian di era reformasi, uji coba perubahan tentang mekanisme demokrasi pancasila dan UUD 1945 kita lakukan untuk mencari bagaimana bentuk dan demokrasi dan wujud demokrasi pancasila yang murni seperti yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu, yang berakar dari kebudayaan serta nilai-nilai tradisional bangsa indonesia ini sendiri. Kalau kita selalu melihat contoh demokrasi barat atau negara-negara lain bisa saja kita mengalami kembali masa kegelapan yang modern dan lebih canggih daripada masa kegelapan yang dialami tujuh wanua sebelum kedatangan manurungge ri matajang ataukah masa kegelapan seperti yang dialami putra mahkota pewaris

kerajaan bone, latenritatta toa patunru arung palakka pada waktu baginda masih berusia 12 tahun.

Pada tahun 1905 kerajaan bone jatuh ketangan penjajah dan terbentuk pemerintahan sendiri di bawah pengawasan belanda, berhubung karena sejak tertangkapnya kerajaan bone lappawawoi karaeng sageri, tahta kerajaan bone tidak terisi maka atas usaha belanda pada tahun 1931 di angkatlah tenri sukki ( andi mappanyukki) pytra dari la makkulau karaeng lembang pareng sombayya ri gowa mwnjadi raja di bone ke 32 (1931) sampai/1946 oleh karena itu raja bone ke 32 tidak menerima keberadaan NICA maka pada awal tahun 1946, menarik diri dari tahta kerajaan dan di gantikan kerajaan bone yang ke 33 lapabenteng petta matinroe ri matuju yang bertahta 1946 sampai 1951.

## **2. Kondisi Geografis wilayah**

### **a. Letak Geografis**

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km<sup>2</sup> atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13' – 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42'-120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis . Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77–86 persen dengan suhu udara 24,4°C-27,6°C.

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Monsoon dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah tersebut,terdapat juga wilayah peralihan, yaitu Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Jumlah curah hujan bulanan di Wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah hujan tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu 638 mm dengan banyaknya hari hujan sebanyak 23 hari. Bagian Timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan Bone mempunyai **garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke utara**. Bagian barat dan selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-celahnya terdapat aliran sungai.

Pada tahun 2016, tercatat 194 sungai mengalir di Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

### **b.Ketinggian Tempat**

Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi mulai dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut :

- Ketinggian 0 -25 meter seluas 81. 925,2 Ha (17,97%)
- Ketinggian 25 -100 meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
- Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)
- Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)
- Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%)
- Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%)

### **c.Kemiringan Lereng**

Keadaan permukaan lahan bervariasi, mulai dari landai, bergelombang hingga curam. Daerah landai dijumpai sepanjang pantai dan bagian utara, sementara di bagian Barat dan Selatan umumnya bergelombang hingga curam dengan rincian sebagai berikut :

- Kemiringan lereng 0-2% (datar) : 164.602 Ha (36,1%)
- Kemiringan lereng 0-15% (landai dan sedikit bergelombang) : 91.519 Ha
- Kemiringan lereng 15-40% (bergelombang) : 12.399 Ha (24,65%)
- Kemiringan lereng >40% (curam) : 12.399 Ha (24,65%)

### **d.Kedalaman Tanah**

Kedalaman efektif tanah terbagi atas empat kelas, yaitu :

- 0-30 cm seluas 120.505 Ha (26,44%)
- 30-60 cm seluas 120.830 Ha (26,50%)
- 60-90 cm seluas 30.825 Ha (6,76%)
- >90 cm seluas 183.740 Ha (40,30%)

**e. Jenis Tanah**

Jenis tanah yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari tanah Aluvial Gleyhumus, Litosol, Regosol, Mediteran, dan Renzina. Jenis tanah didominasi oleh tanah mediteran seluas 67,6% dari total wilayah kemudian Renzina 9,59%, dan Litosol 9%. Penyebaran jenis tanahnya yaitu sepanjang Pantai Timur Teluk Bone ditemukan tanah Aluvial.



Gambar 2  
peta

### 3. PENDUDUK KABUPATEN BONE

Penduduk Kabupaten Bone berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak **746.973** jiwa yang terdiri atas **356.691** jiwa penduduk laki-laki dan **390.282** jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Bone mengalami pertumbuhan sebesar 0,55 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 0,62 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,48 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 91,39. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone tahun 2016 mencapai 164 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 27 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Tanete Riattang dengan kepadatan sebesar 2.193 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Bontocani sebesar 34 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 4. KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BONE

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Bone Pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone pada Tahun 2016 sebesar **2.015** pekerja, dengan kenaikan 73,56 persen dibanding tahun 2015. Perbandingan pencari kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Pada Tahun 2016 tercatat 664 laki-laki dan 1.351 perempuan pencari kerja terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone. Pencari kerja di Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2016 terbanyak berada di Kecamatan Tanete Riattang dengan jumlah pencari kerja 332 orang. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Ketenagakerjaan berpendidikan terakhir Diplomal/II/III/Akademi yaitu sebesar 39,06 persen (787 pekerja) tahun 2016. Sementara itu menurut sektor



lapangan usaha, sektor Perdagangan merupakan sektor yang memiliki jumlah usaha terbanyak di tahun 2016 yaitu sebesar 1.807 usaha dengan jumlah tenaga kerja terserap pada lapangan usaha ini sebesar 4.900 pekerja.

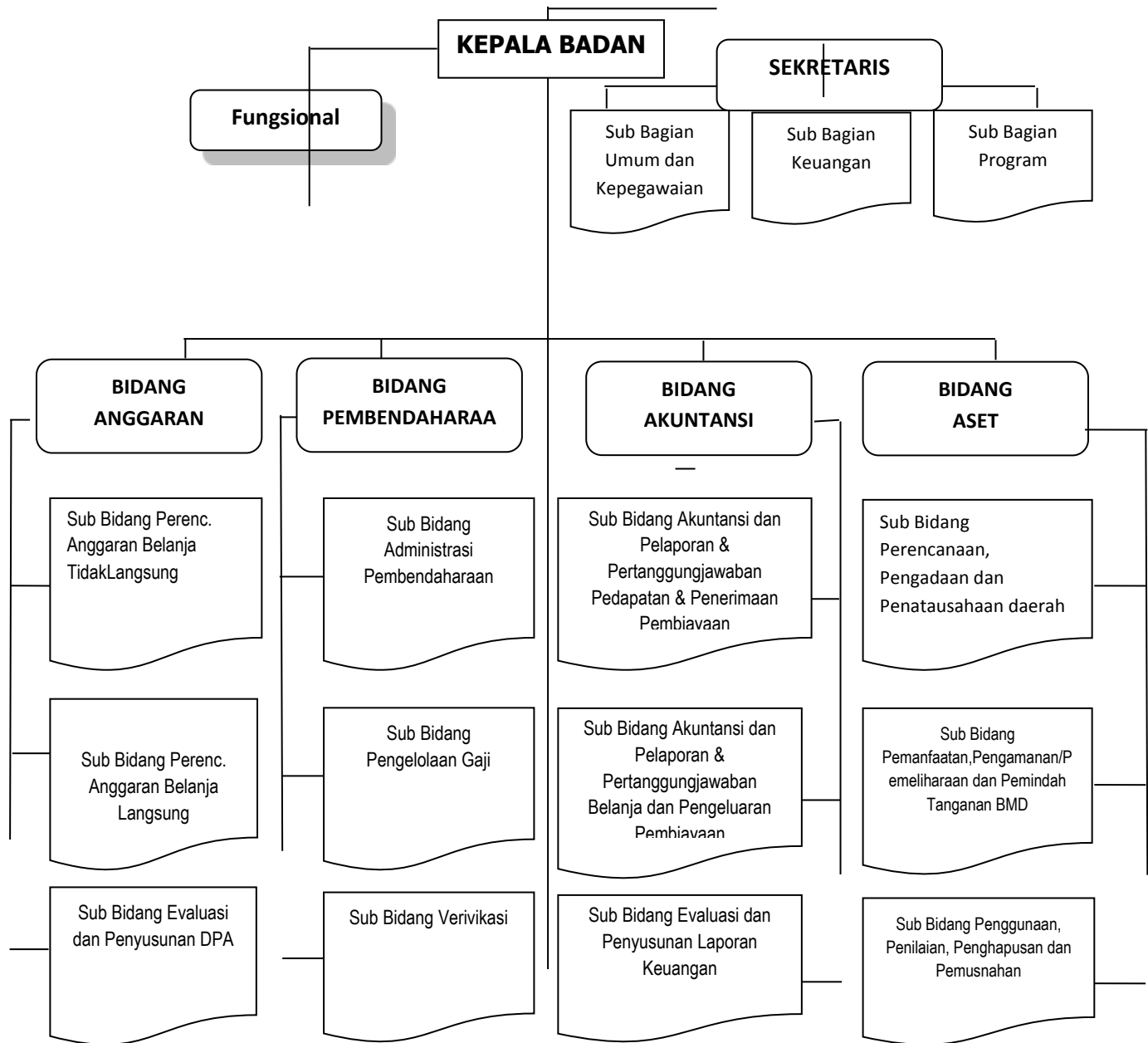
## **5.ADAT DAN BUDAYA KABUPATEN BONE**

Masyarakat kabupaten bone, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di provinsi Sulawesi selatan pada umumnya, merupakan pemeluk agama islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan pendidikan agama islam. Sekalipun demikian penduduk kabupaten bone yang mayoritas pemeluk agama islam, tetapi di kota watampone juga ada gereja dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan ibadahnya.

Budaya masyarakat bone demikian tinggi mengenai system norma dan adat berdasarkan lima unsur pokok masing-masing: ade, bicara, rapang, wari, dan sara yang terjadi satu sama lain, sebagai satu kesatuan organis dalam pikiran masyarakat yang memberi rasa harga diri serta martabat dari pribadi masing-masing. Semuanya itu terkandung dalam satu konsep yang disebut” siri merupakan integral dari lima unsur pokok tersebut diatas yakni pengadereng (norma adat), untuk mewujudkan nilai pengadereng maka rakyat bone memiliki sekaligus mengamalkan semangat?budaya : 1. SIPAKATAU artinya saling memanusiaikan,menghormati/ menghargai harkat dan martabat manusia seseorang sebagai mahluk ciptaan Allah tanpa membeda-bedakan. 2. SIPAKALEBBI artinya, saling memuliakan posisi.

**B. Struktur Organisasidan Job Description**

**a. Struktur Organisasi**



**U P T D**

**Gambar3**

**Struktur organisasi**

**Tugas pokok, fungsi dan badan penelolah keuangan dan aset daerah kabupaten bone.**

Tugas dan fungsi kepala beserta staff BPKAD dapat diikuti dibawah ini.

**1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

**Tugas Pokok:** Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

**Fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah
- e. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD berwenang:

- 1) Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD
- 2) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD
- 3) Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran SKPD
- 4) Menetapkan Surat Persediaan Dana (SPD)
- f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah

- g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- h. Menyusun kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
- i. Melaksanakan kebijakan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dibantu oleh satu Sekretaris dan empat Kepala Bidang.

## **2. Sekretaris**

Tugas pokok Sekretaris adalah menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **Fungsi:**

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengoordinasian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- c. Pembinaan urusan rumah tangga dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Negara/Keayaan Negara;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala Bidang Anggaran**

Tugas Pokok Kepala Bidang Anggaran adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penganggaran daerah dengan mengkoordinasikan, mengendalikan penyusunan program dan kegiatan SKPD sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

Fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- b. Merumuskan kebijakan pelaksanaan APBD dan APBD-P;
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan DPA SKPD dan DPPA SKPD;
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

### **4. Kepala Bidang Aset**

Tugas Pokok Kepala Bidang Aset adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang aset yang menjadi tanggungjawabnya.

Fungsi:

- a. Perumusan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi penatausahaan, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pengamanan/pemeliharaan, pemindaan, penghapusan dan pemusnahan barang milik daerah; dan

- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Pembendaharaan**

Tugas pokok bidang perbendaharaan adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang perbendaharaan, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, pembinaan kebendaharaan, mengusulkan penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD serta melakukan penagihan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

### **Fungsi**

- a. Pengumpulan, pengelolaan data dalam rangka penyusunan program kegiatan bidang perbendaharaan dan verifikasi;
- b. Pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat Perintah Membayar dari SKPD;
- c. Pemberian pertimbangan serta mengikuti pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi;
- d. Pelaksanaan sistim penggajian, pelaporan data data PNS yang efektif dan efisien;
- e. Pelaksanaan koordinasi penerimaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Kepala Bidang Akuntansi**

Tugas Pokok Kepala Bidang Akuntansi adalah membantu Kepala Badan dalam melaksanakan bidang akuntansi, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalika, menyusun pedoman dan petunjuk teknis

pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

sedangkan fungsinya adalah :

- a. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program bidang akuntansi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pemerintah pada SKPD;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan bintek akuntansi pemerintah serta regulasi keuangan lainnya;
- d. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sejak berdiri untuk pertamakalinya berbentuk Badan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan mengalami penyempurnaan sesuai PP 41 Tahun 2007, menjadi organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan mengalami perubahan lagi menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian

### 3. Bidang Anggaran

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung
- b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

### 4. Bidang Akuntansi

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan.

- a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

### 5. Bidang Aset

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penata Usahaan
- b. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan/Pemeliharaan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah
- c. Sub Bidang Penggunaan, Penilaian, Penghapusan dan Pemusnahan.

### 6. Bidang Pembendaharaan

- a. Sub Bidang Administrasi Pembendaharaan
- b. Sub Bidang Pengelolaan gaji
- c. Sub Bidang Verifikasi.

#### a. Visi dan Misi

**Visi** adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode tertentu. Suatu visi merupakan inspirasi sehingga mendorong harapan dan impian kepada masa depan yang lebih baik dan hasil yang positif.



Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standar yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai yang tertuang dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan, karena itu harus realistis dan tidak muluk-muluk dengan mempertimbangkan kemampuan dan waktu yang tersedia. Visi ditetapkan sebagai panduan untuk mengimplementasikan strategi, serta menetapkan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, harus tetap mengacu kepada Visi Kabupaten Bone tahun 2013-2018 yaitu **“TERWUJUDNYA INSTITUSI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL”**. Frase dari visi ini adalah :

### **1. Bersih**

Bersih adalah aparatur BPKAD yang mentaati azas-azas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

### **2. Transparan**

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang dianut oleh BPKAD dalam mempertanggungjawabkan penyusunan anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

### 3. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan BPKAD dalam mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban sebagai institusi sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik dan mempertahankan opini WTP yaitu Laporan Keuangan (LK) yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.

**Misi**, adalah identifikasi tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan visi yang telah ditetapkan, sehingga rumusan misi merupakan rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Adapun rumusan dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c) Mengoptimalkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan WTP.

Mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

## **B . Hasil Penelitian**

**Berikut penjelasan teks Anggaran dan realisasi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone.**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi

pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Tabel 4.1.Laporan realisasi & anggaran pemerintah daerah kabupaten bone 2014.**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2014 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2014 (Rp)</b>	<b>%</b>
Pendapatan asli daerah	149.205.060.559,00	155.451.591.186,50	104,18
Pendapatan transfer	1.350.094.226.684,00	1.352.154.495.205,46	100,15
Transfer pemerintah pusat-Dana perimbangan	1.074.136.614.309,00	1.083.624.984.390,00	100,88
Transfer pemerintah pusat lainnya	217.767.982.000,00	217.767.982.000,00	100,00
Transfer pemerintah provinsi	58.189.630.375,00	50.761.528.815,46	87,23
Lain-lain pendapatan yang sah	33.732.472.760,00	27.066.070.714,00	80,23
Total pendapatan transfer	1.533.031.760.003,00	1.534.672.157.105,96	100,10
Belanja operasi	1.287.849.910.555,00	1.214.855.389.312,60	94,33
Belanja Modal	246.147.376.754,00	209.579.370.996,00	85,14
Belanja tak terduga	500.000.000,00	241.750.000,00	48,35
Jumlah belanja	1.534.497.287.309,00	1.424.434.760.308,60	92,82
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa	1.754.472.000,00	1.754.472.000,00	100,00
Total belanja dan transfer	1.621.565.104.168,00	1.490.810.671.726,44	91,93
<b>SURPLUS(DEFISIT)</b>	<b>(88.533.344.165,00)</b>	<b>48.861.485.379,52</b>	<b>(49,54)</b>

Jumlah penerimaan pembiayaan	94.159.190.064,00	94.494.512.563,79	100,35
Jumlah pengeluaran pembiayaan	5.625.845.899,00	5.467.529.694,00	97,18
PEMBIAYAAN NETTO	88.533.344.165,00	89.026.982.869,79	100,55

Sumber: DPPKAD ( Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah).

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp. 149.205.060.559,00 dapat di realisasi sebesar Rp.155.451.591.186,50 atau 104,18% Pembiayaan netto yang direncanakan Rp.88.533.344.165,00 dapat di realisasi sebesar Rp.89.026.982.869,79 atau 100,55%, lebih dari anggaran sebesar Rp.1.350.094.226.684,00 sedangkan pembiayaan pengeluaran direncanakan sebesar Rp.5.625.845.899,00 dapat direalisasi sebesar Rp.5.467.529.694,00 atau 97,18%, kurang dari anggaran sebesar Rp.241.750.000,00.

**Tabel 4.2. Laporan realisasi & anggaran pemerintah daerah kabupaten bone 2015:**

URAIAN	ANGGARAN 2015	REALISASI 2015	%
Pendapatan asli daerah	156.421.92.399,00	159.866.219.583,62	102,20
Pendapatan transfer	1.260.075.685.600,00	1.242.614.366.711,00	98,61
Pendapatan transfer lainnya	388.189.433.000,00	385.474.033.000,00	99,30
Transfer pemerintah provinsi	67.138.405.753,00	53.871.562.151,28	80,23
Total pendapatan transfer	1.715.403.524.353,00	1.681.959.961.862,28	98,05
Belanja operasi	1.467.868.555,00	1.324.096.728.39,71	90,20

Belanja Modal	336.574.748.097,00	304.197.875.790,00	90,38
Belanja tak terduga	500.000.000,00	241.750.000,00	48,35
Jumlah belanja	1.804.943.402.652,00	1.628.536.353.929,0 0	90,22
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Desa		1.754.472.000,00	
SURPLUS(DEFISIT)	(121.788.714.690,00)	28.457.894.500,49	(23,36)
Jumlah pengeluaran pembiayaan	5.753.757.595,00	5.595.941.390,00	97,25
PEMBIAYAAN NETTO	121.788.714.690,00	131.079.327.941,77	107,62

Sumber: DPPKAD ( Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan,dan Aset

Daerah).

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp.156.421.92.399,00dapat di realisasi sebesar Rp. 159.866.219.583,6 atau 102,2% Pembiayaan netto yang direncanakan Rp. 121.788.714.690,00 dapat di realisasi sebesar Rp. 131.079.327.941,77 atau 107,62%,lebih dari anggaran sebesar Rp. 28.457.894.500,49sedangkan pembiayaan pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 5.753.757.595,00dapat direalisasi sebesar Rp. 5.595.941.390,00atau 97,25%,kurang dari anggaran sebesar Rp.241.750.000,00.

**Tabel 4.3.Laporan realisasi & anggaran pemerintah daerah kabupaten bone 2016:**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2016 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2016 (Rp)</b>	<b>%</b>
Pendapatan asli daerah	177.333.582.070,00	180.156.598.903,17	101,59
Pendapatan transfer dana perimbangan	1.565.186.413.780,00	1.540.620.696.554,00	98,43
Pendapatan transfer pusat lainnya	202.773.125.000,00	202.773.125.000,00	100,00
Transfer pemerintah provinsi	104.153.741.094,00	107.940.565.438,00	103,63
Total pendapatan transfer	1.872.113.279.874,00	1.851.334.386.992,00	98,89
Pendapatan lain-lain yang sah	11.038.190.000,00	11.038.188.960,00	99,99
Jumlah pendapatan	2.060.485.051.944,00	2.042.529.174.855,17	99,12
Belanja operasi	1.497.137.260.410,00	1.396.943.806.322,91	93,30
Belanja Modal	367.902.289.366,00	330.744.293.124,00	89,90
Belanja tak terduga	1.000.000.000,00	734.156.026,00	73,41
Jumlah belanja	1.866.039.549.776,00	1.728.422.255.472,91	92,62
Jumlah belanja dan Transfer	2.184.766.158.776,00	2.045.111.813.068,91	93,60
SURPLUS(DEFISIT)	(124.281.106.832,00)	(2.582.638.213,74)	2,07
Jumlah penerimaan Pembiayaan	161.537.222.442,00	159.956.768.596,26	99,02
Jumlah pengeluaran pembiayaan	37.256.115.610,00	36.652.330.420,00	98,37
PEMBIAYAAN NETTO	124.281.106.832,00	123.304.438.176,26	99,21

Sumber: DPPKAD ( Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan,dan Aset Daerah).

Pendapatan asli daerah yang direncanakan Rp. 177.333.582.070,00 dapat di realisasi sebesar Rp.180.156.598.903,17atau 101,59%.Pembiayaan netto yang direncanakan Rp. 124.281.106.832,00 dapat di realisasi sebesar Rp.

123.304.438.176,26 atau 99,21%, lebih dari anggaran sebesar Rp.

(2.582.638.213,74) sedangkan pembiayaan pengeluaran direncanakan sebesar Rp. 37.256.115.610,00 dapat direalisasi sebesar Rp. 36.652.330.420,00 atau 98,37, kurang dari anggaran sebesar Rp.241.750.000,00.

pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan bersinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintahan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, ada beberapa rasio yang dapat digunakan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut:

### 1. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstern.

#### 1. Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{155.451.591.186,50}{1.352.154.495.205,46+ 0} \times 100\% \end{aligned}$$



$$= 0,114\%$$

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian 2014 menunjukkan lebih besar dari rasio kemandirian 2015.

## 2 Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2015

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{159.866.219.583,62}{1.681.959.961.862,28} \times 100\% \\ &= 0,095\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian 2015 menunjukkan lebih kecil dari rasio kemandirian 2014.

## 3.Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2016

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian} &= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman}} \\ &= \frac{180.156.598.903,17}{1.851.334.386.992,00} \times 100\% \\ &= 0,097\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan rasio kemandirian 2016 menunjukkan lebih besar dari rasio kemandirian 2015.

## 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Bone dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah}}$$

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

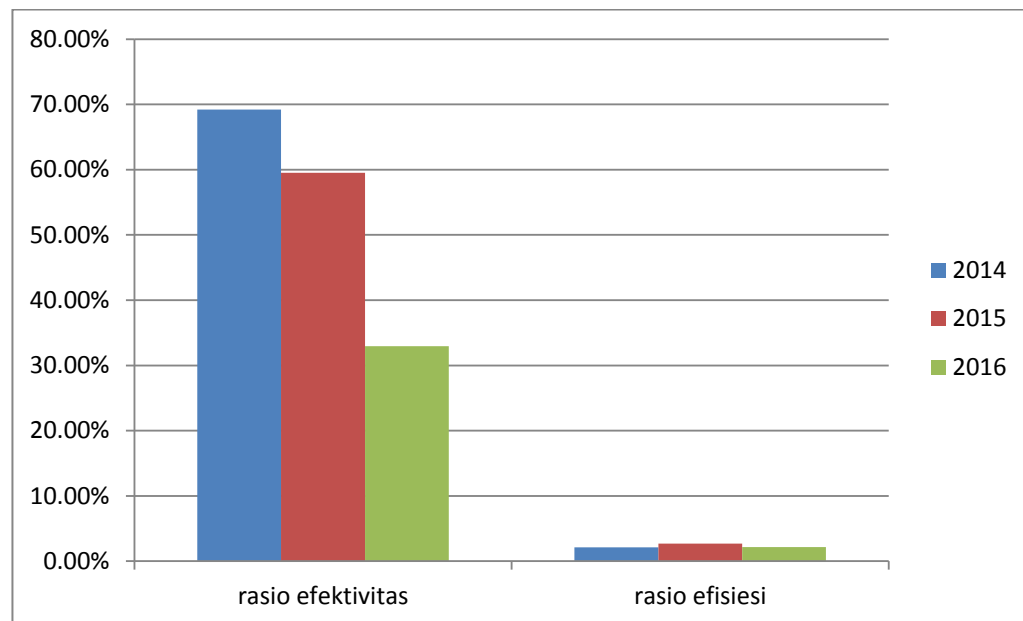
Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Bone dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

**Tabel 4.4** Target dan Realisasi Tahun Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014-2016

<b>Keterangan</b>	<b>2014 (Rp)</b>	<b>2015 (Rp)</b>	<b>2016 (Rp)</b>
Target Penerimaan PAD	32.797.480.272,00	35.974.314.248,00	52.606.038.817,00
Realisasi Penerimaan PAD	20.398.764.209,46	21.418.839.483,39	17.343.783.489,88
Biaya Pemungutan PAD	435.297.722,00	580.887.744,00	375.522.395,00
<b>Rasio Efektivitas</b>	62,19 %	59 ,53%	32 ,96%
<b>Rasio Efisiensi</b>	2,13 %	2,71 %	2,16 %

Sumber: Data Diolah



**Gambar 3**

**Rasio Efektifitas dan Efisiensi**

$$\begin{aligned}
 \text{a) Rasio Efektifitas 2014} &= \frac{20.398.764.209,46}{32.797.480.272,00} \times 100\% \\
 &= 62,19 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efektivitas 2014 relatif lebih besar di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 dan 2016. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efektifitas 2015} &= \frac{21.418.839.483,39}{35.974.314.248,00} \times 100\% \\
 &= 59,53\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efektivitas 2015 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2016 . Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

$$\text{Rasio Efektifitas 2016} = \frac{17.343.783.489,88}{\quad} \times 100\%$$

$$52.606.038.817,00$$

$$= 32,96\%$$

Dari perhitungan rasio Efektivitas 2016 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{b) Rasio Efisiensi 2014} &= \frac{435.297.722,00}{20.398.764.209,46} \times 100\% \\ &= 2,13\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efisiensi 2014 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2015} &= \frac{580.887.744,00}{21.418.839.483,39} \times 100\% \\ &= 2,71\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efisiensi 2015 relatif lebih besar di bandingkan dengan rasio efektifitas 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2016} &= \frac{375.522.395,00}{17.343.783.489,88} \times 100\% \\ &= 2,16\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio Efisiensi 2016 relatif lebih rendah di bandingkan dengan rasio efektifitas 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone kurang baik.

### **3. Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

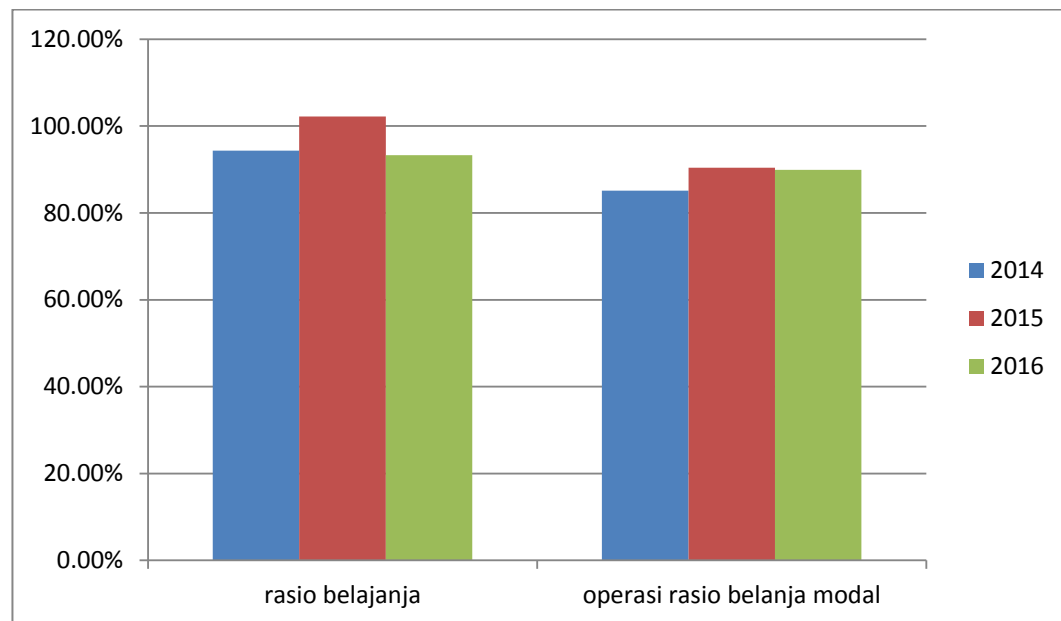
$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

**Tabel 4.5** Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2014-2016

Keterangan	2014	2015	2016
Belanja Operasi	<b>1.214.855.389.312,60</b>	1.324.096.728.139,71	1.396.943.806.322,91
Belanja Modal	<b>209.579.370.996,00</b>	304.197.875.790,00	330.744.293.124,00
<b>Rasio Belanja Operasi</b>	<b>94, 33</b>	102, 20	93, 30
<b>Rasio Belanja Modal</b>	<b>85,14</b>	90,38	89,90

Sumber : Data diolah



**Gambar 4**

**Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)**

1. Rasio Aktivitas tahun 2014 :

$$\begin{aligned}
 \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{389.126.144.860,40}{542.037.871.764,40} \times 100\% \\
 &= 71,78 \%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja operasi 2014 relatif lebih besar di bandingkan belanja modal 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned}
 \text{b. Belanja Modal} &= \frac{152.911.726.904,00}{524.037.871.764,40} \times 100\% \\
 &= 28,21\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja modal 2014 relatif lebih rendah di bandingkan belanja operasi 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

2. Rasio Aktivitas 2015 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 77,51\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja operasi 2015 relatif lebih besar di bandingkan belanja modal 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00}{539.769.130.201,00} \times 100\% \\ &= 22,39\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja modal 2015 relatif lebih rendah di bandingkan belanja operasi 2014 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

### 3. Rasio Aktivitas 2016 :

$$\begin{aligned} \text{a. Belanja Operasi} &= \frac{496.282.699.295,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 83,17\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja operasi 2014 relatif lebih besar di bandingkan belanja modal 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00}{596.639.563.164,00} \times 100\% \\ &= 16,73\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan belanja modal 2016 relatif lebih rendah di bandingkan belanja operasi 2015 .Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah kabupaten bone baik.

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

**Tabel 4.6** Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 -2016.

No.	Keterangan	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	<b>155.451.591.186,50</b>	159.866.219.583,62	180.156.598.903,17
2.	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		102,20	101,59
3.	Pendapatan	<b>1.534.672.157.105,96</b>	1.870.233.204.845,90	2.042.529.174.855,17
4..	Pertumbuhan Pendapatan		98,52	99,12
5.	Belanja Operasi	<b>1.214.855.389.312,60</b>	1.324.096.728.139,71	1.396.943.806.322,91
6.	Pertumbuhan Belanja Operasi		90,20	93,30
7.	Belanja Modal	<b>209.579.370.996,00</b>	304.197.875.790,00	330.744.293.124,00
8.	Pertumbuhan Belanja Modal		90,38	89,90

Sumber: Data diolah

##### 1. Rasio Pertumbuhan 2014 -2016

$$\begin{aligned}
 \text{a. PAD} &= \frac{21.418.839.483,39 - 20.398.764.209,46}{20.398.764.209,46} \\
 &= 5,00 \%
 \end{aligned}$$



Dari hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{b. Pendapatan} &= \frac{526.763.453.464,39 - 519.069.067.698,96}{519.069.067.698,96} \\ &= 1,48 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Rasio Pendapatan dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecil kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{c. Belanja Operasi} &= \frac{418.423.506.141,00 - 389.126.144.860,40}{389.126.144.860,40} \\ &= 7,52 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Rasio operasi dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{d. Belanja Modal} &= \frac{120.856.244.770,00 - 152.911.613.904,00}{152.911.613.904,00} \\ &= -20,96 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan Belaja modal dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

## 2. Rasio pertumbuhan 2014 – 2016

$$\begin{aligned} \text{a. PAD} &= \frac{17.343.783.489,88 - 21.418.839.483,39}{21.418.839.483,39} \\ &= -19,02\% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan PAD dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecil kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{b. Belanja Operasi} &= \frac{496.282.699.295,00 - 418.423.506.141,00}{418.423.506.141,00} \\ &= 18,60 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan belanja operasi dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecil kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

$$\begin{aligned} \text{c. Belanja Modal} &= \frac{99.857.780.515,00 - 120.856.244.770,00}{120.856.244.770,00} \\ &= -17,37 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan belanja modal dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan ini dapat mengukur seberapa kecil kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai dari tahun ke tahun

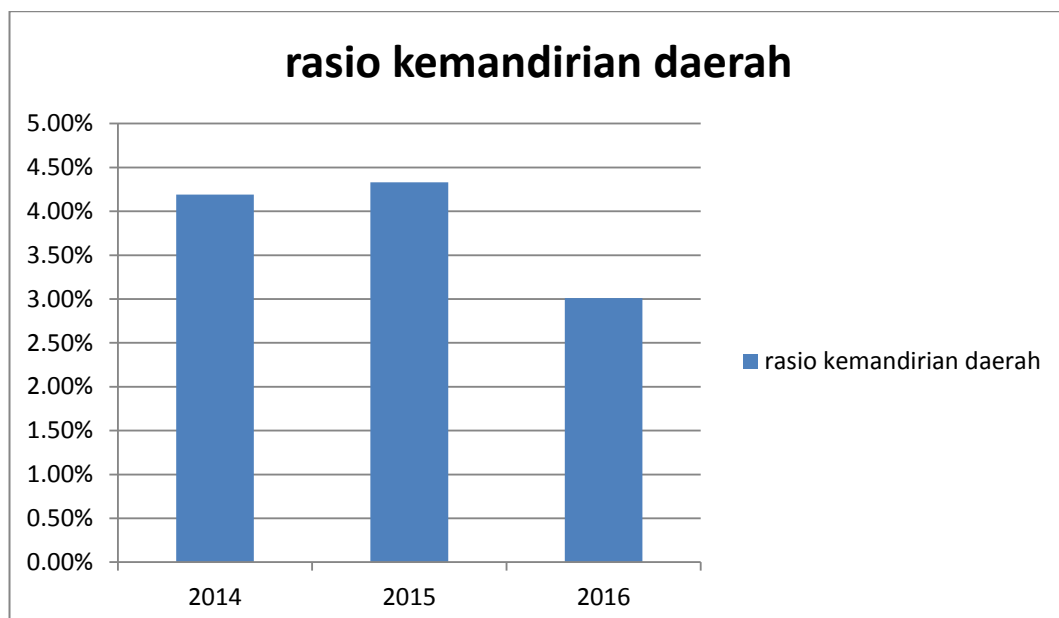
### 5.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Dearah Kabupaten Bone

#### 1. Rasio Kemandirian Daerah

**Tabel 4.7** Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014-2016.

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
Rasio Kemandirian Daerah	4,19%	4,33%	3.01%	Kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah

Sumber: Data diolah



**Gambar 5**

**Rasio Kemandirian Daerah**

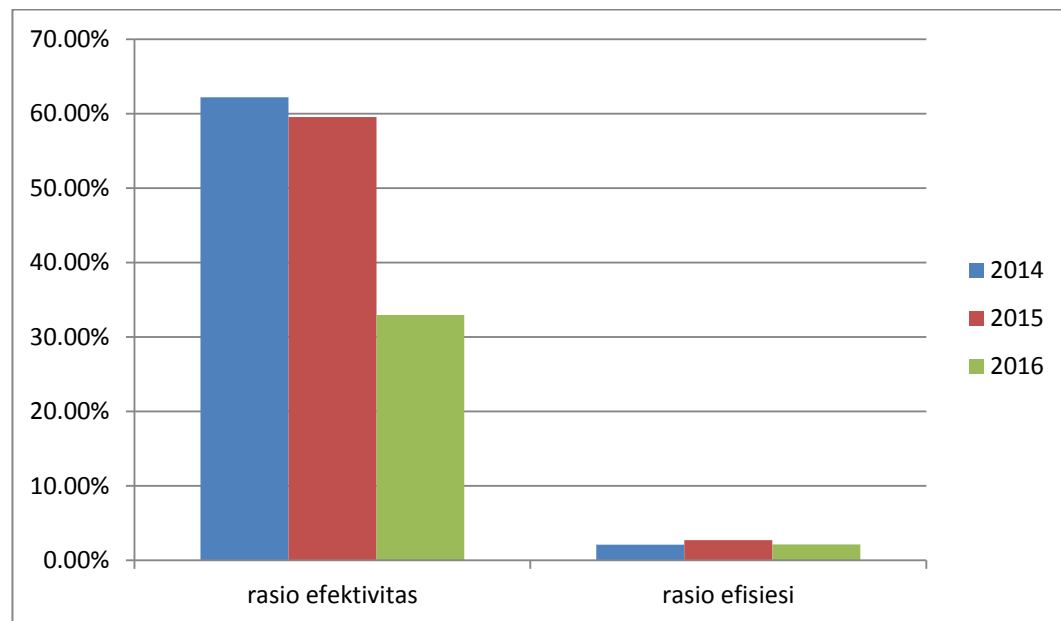
Dari tabel dan grafik di atas diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bone pada tahun anggaran 2014 sebesar 4,19%, naik pada tahun 2015 sebesar 4,33% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 3,01%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah. Terlihat dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintahan pusat dan provinsi), baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah khususnya pada pendapatan lain-lain PAD yang sah yang mengalami penurunan di tahun anggaran 2014-2016

## 2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi

**Tabel 4.8** Rasio Efektifitas dan Efisiensi Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014-2016

No.	Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
1.	Rasio Efektifitas	62,19 %	59,53%	32,96%	Pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan pendapatan daerah pada tahun 2008-2010
2	Rasio Efisiensi	2,13 %	2,71 %	2,16 %	Pemerintah daerah sangat efisien dalam memungut sumber pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensinya menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Sumber: Data diolah



**Gambar 6**

### **Rasio Efektivitas dan Efisiensi**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi dapat dilihat bahwa rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Bone dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2014 adalah 62,19 %, 2009 59,53 % dan 2010 32,96 % . Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah khususnya dalam melakukan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sedangkan dari perhitungan rasio efisiensi diatas kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone dapat dikatakan sangat efisien karena dari perhitungan rasio dari tahun 2014 2,13%, 2013 2,71%, dan 2016 2,16% mengalami kenaikan pada tahun pada tahun 2015 yang berarti adanya penurunan kinerja pada pemerintah, lalu pada tahun 2016 rasio efisiensinya mengalami penurunan yang

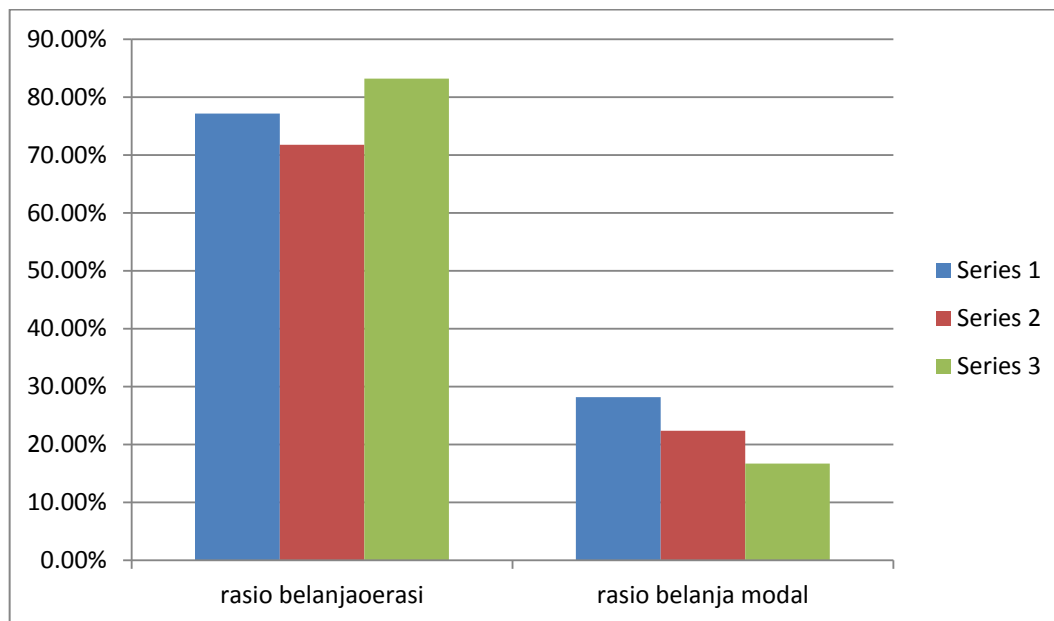
menggambarkan meningkatnya kinerja pemerintah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami peningkatan kinerja dari segi efisiensinya melakukan pemungutan sumber pendapatan.

### 3. Rasio Aktivitas (Rasio Keseimbangan)

**Tabel 4.9** Rasio Aktivitas Kabupaten BoneTahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
Rasio Belanja Operasi	77,15 %  28,21 %	71,78 %	83,17 %  16,73 %	Sebagian besar dana APBD diiprioritaskan untuk kebutuhan operasional sehingga belanjaoperasional mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2010 Hanya sebagian kecil dana APBD
Rasio Belanja Modal		22,39 %		digunakan untuk pembangunan dan itupun rasionya mengalami penurunan dari tahun ke tahun

Sumber : Data diolah



**Gambar 7**

### **Rasio Belanja operasi**

Dari tabel 4.9 di atas terlihat sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal terhadap APBD masih relatif kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja operasi maupun belanja modal terhadap APBD yang ideal karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Namun hal ini masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bone karena terlihat rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.

## 2. Rasio Pertumbuhan

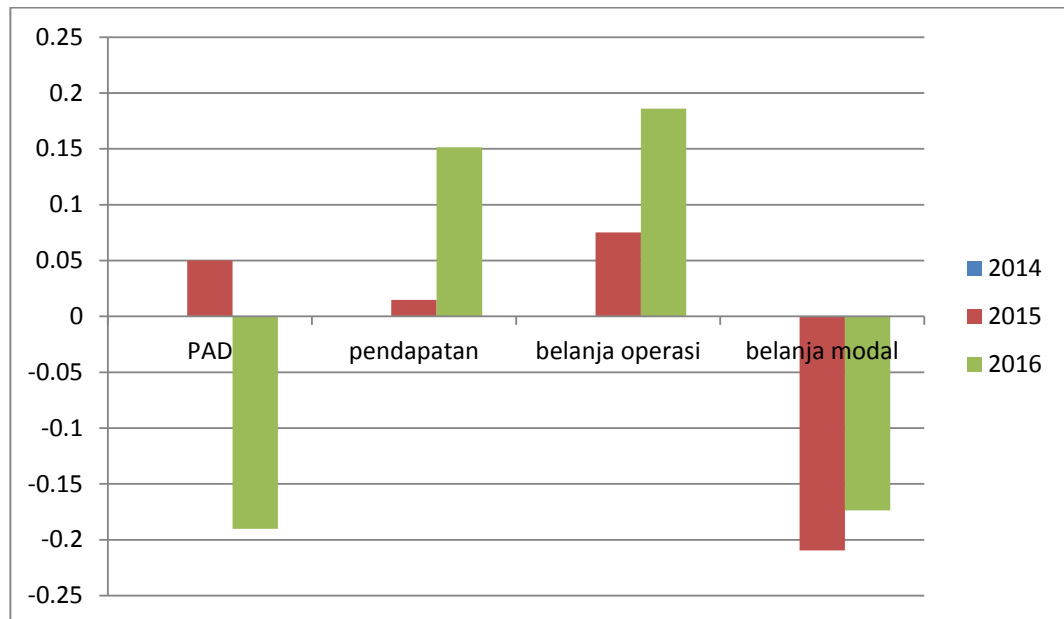
**Tabel 4.10** Rasio Pertumbuhan Kabupaten BoneTahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016	Keterangan
PAD	-	5,00 %	-19,02 %	Kinerja pemerintahan daerah menunjukkan pertumbuhan yang positif selama tahun 2008-2009 hanya pada 2008-2009 hanya pada
Pendapatan	-	1,48 %	15,13 %	
Belanja Operasi	-	7,52 %	18,60 %	
Belanja Modal	-	-20,96 %	-17,37 %	

belanja modal yang pertumbuhannya negatif. Dan tahun 2009-2010 hanya pertumbuhan pendapatan dan belanja operasi yg mengalami pertumbuhan yang negatif.

Sumber : Data diolah





**Gambar 8**

#### **Rasio Kemandirian Daerah**

Dari perhitungan rasio pada tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Bulukumba pada Tahun Anggaran 2014-2015 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif. Sedangkan pada tahun 2015-2016 pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif. Sebaliknya dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal mengalami pertumbuhan yang negatif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik turun dari tahun ke tahun, yaitu dari 4,19 % pada tahun 2014 menjadi 4,33% pada tahun 2015 dan 3,01% pada tahun 2016. Dimana terjadi peningkatan kemandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2015.
2. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan tergolong efisien, yakni pada tahun 2014 memiliki rasio efektifitas 62,19% dan rasio efisiensi 2,13% kemudian pada tahun 2015 memiliki rasio efektifitas sebesar 59,53% dan rasio efisien 2,71%, dan pada tahun 2016 memiliki rasio efektifitas 32,96% rasio efisien sebesar 2,16%.
3. Sebagian besar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi daripada belanja modal. Namun pelaksanaan pembangunan masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terlihat dari rasio belanja modal dari tahun ke tahun menurun.
4. Pertumbuhan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2014-2016 menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan

asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Sedangkan pada pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan yang positif.

5. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone selama periode penelitian (tahun 2014 sampai tahun 2016) kurang baik karena hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis rasio kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka peneliti dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dapat menggunakan analisis rasio keuangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja untuk kepentingan manajemen birokrasi pemerintahan serta untuk menambah kualitas sistem informasi keuangan daerah.
2. Lebih mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan PAD sehingga ketergantungan terhadap sumber dana ekstern dapat diminimalisir.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan

mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan melakukan perekrutan pegawai yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu diharapkan penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sehingga memudahkan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Aries Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Efferin, Sujoko Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitriyah Agustin. (2007). "Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)". *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2005. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*.Salemba Empat.
- Hendro Sumarjo. (2010). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Sulisyowati Firman dan Andre Purwanugraha, Herbertus. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.